

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN KAS DAN  
IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
KECURANGAN  
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S1) Ekonomi di Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**FITRIATIL HUSNA**  
**05217/2008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

**Judul** : Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern  
Kas dan Implementasi *Good Corporate  
Governance* terhadap Kecurangan  
(Studi Empiris Pada BUMN Kota Padang)

**Nama** : Fitriatil Husna

**Nim/BP** : 05217/2008

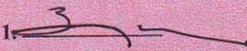
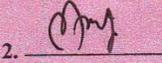
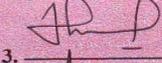
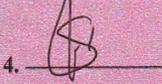
**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Keuangan

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 29 Januari 2013

Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Dr. H. Syamwil, M.Pd	1. 
2.	Sekretaris	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	: Salma Taqwa, SE, M.Si	4. 

## ABSTRAK

**Fitriatil Husna. (2008/05271). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang). Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2012.**

**Pembimbing I : Dr. H.Syamwil M.Pd**  
**II : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauhmana pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan

Jenis penelitian ini adalah kausatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN di kota Padang berjumlah 34 perusahaan. Sampel penelitian ini adalah (*total sampling*) dengan responden kepala cabang, manajer akuntansi dan staf akuntansi sebanyak 102 responden. Metode pengumpulan menggunakan kuesioner. Jenis dan sumber data adalah data primer. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan uji F, uji  $R^2$  dan uji t.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan dimana nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $7,902 > 3,328$  dengan nilai sigfinikasi  $0,002 < 0,05$  ( $H_1$  diterima) (2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-2,152 < 1,699$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,040 < \alpha 0,05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai negatif yaitu sebesar  $-0,354$  ( $H_2$  diterima). (3) Implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-2,132 < 1,699$ ), dengan tingkat signifikansi  $0,042 < \alpha 0,05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai negatif yaitu sebesar  $-0,351$ . ( $H_3$  diterima).

Akhirnya disarankan :1) Agar perusahaan meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* agar kecurangan didalam perusahaan dapat menurun 2) Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan menemukan variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang).”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H.Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Nurzi Sebrina SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Pimpinan perusahaan BUMN di Kota Padang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Teristimewa buat Ayahanda dan Ibunda , Kakak beserta Adikdan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya atas bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan motivasi dan kerjasamadari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Untuk penyempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan fikiran dari para pembaca berupa kritikan dan saran. Semoga skripsi ini dapat bahan bacaan dan bermanfaat bagi rekan-rekan di masa yang akan datang dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia penelitian dan akademis.

Padang, Januari2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>ii</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori	
1. Kecurangan.....	11
a. Pengertian.....	11
b. Pelaku Kecurangan.....	12
c. Faktor- faktor yang berhubungan dengan kecurangan .....	12
d. Jenis Kecurangan. ....	15
e. Pendeteksian dan Pencegahan Kecurangan.....	18
2. Pengendalian Intern .....	22
a. Pengertian .....	22
b. Tujuan Pengendalian Intern .....	21
c. Komponen Pengendalian Intern .....	24
3. Prosedur Pengendalian Kas.....	26
a. Pengertian Kas.....	26
b. Pengendalian Intern Kas .....	26
c. Hubungan Pengendalian Intern Kas .....	30

4. <i>Good Corporate Governance</i> .....	24
a. Pengertian .....	24
b. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> .....	33
c. Prinsip- prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	33
d. Hubungan Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dengan kecurangan .....	37
B. Penelitian Relevan .....	33
C. Kerangka Konseptual .....	39
D. Hipotesis .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Populasi dan Sampel .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Variabel Penelitian .....	35
F. Instrumen Penelitian .....	35
G. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	38
H. Hasil Uji Coba Instrumen .....	40
J. Uji Asumsi Klasik .....	42
K Teknik Analisis Data .....	43
L. Definisi Operasional .....	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. gambaran umum objek penelitian .....	49
B. Demografi Responden .....	50
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	53
D. Statistik Deskriptif .....	60
E. Uji Asumsi Klasik .....	65
F. Hasil Penelitian .....	65
G. Uji Hipotesis .....	69

H. Pembahasan.....	70
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Keterbatasan dan Saran Penelitian .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Cabang Utama Perusahaan BUMN di Kota Padang .....	32
2. Skala Pengukuran .....	35
3. Instrumen Penelitian.....	36
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian.....	41
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	50
6. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
7. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	51
8. Responden Berdasarkan Usia.....	52
9. Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	53
10. Distribusi Frekuensi Kecurangan.....	54
11. Distribusi Frekuensi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas.....	55
12. Distribusi Frekuensi <i>Good Corporate Governance</i> .....	56
13. Statistik Deskriptif.....	60
15. Uji Normalitas.....	63
16. Uji Multikolinearitas.....	64
17. Uji Heteroskedastisitas.....	65
18. Koefisien regresi (Uji t).....	66
19. Uji F Hitung.....	67
20. Uji Koefisien Determinasi.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	41

## DAFTARLAMPIRAN

1.Surat Penelitian .....	77
2. Kuesioner Penelitian .....	78
3. Tabulasi Penelitian .....	97
4. Distribusi Frekuensi Variabel Kecurangan .....	85
5. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas.	85
6. Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	86
7. Uji Validitas dan Reliabilitas. ....	87
5. Analisis Deskriptif . ....	93
6. Uji Asumsi Klasik .....	93
7. Uji Model .....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

BUMN merupakan bentuk usaha korporasi yang didirikan dengan tujuan utama menjalankan fungsi pemerintahan yaitu agen bagi pembangunan ekonomi. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat tujuan tersebut, agar dapat mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Kepengurusan BUMN harus didorong lebih transparan, profesional dan efisien melalui pengambilan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders*.

Seiring dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha dan investasi menyebabkan risiko terjadinya kecurangan pada perusahaan semakin tinggi. Mengacu ke berbagai kasus baik di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi di mana saja dan termasuk yang cukup besar ada di sektor usaha. Berbagai Perusahaan Swasta ketika terungkap ada kasus tindak pidana korupsi, ternyata perusahaan tersebut juga terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait, mulai dari pegawai, pejabat teras dan

direksi bahkan Dewan Komisaris juga pemilik rentan terhadap konsekuensi hukum sebagai dampak dari kecurangan ini.

Perusahaan yang memiliki lemahnya pengawasan akan mengakibatkan seringnya terjadi kecurangan yang akan merugikan negara, kecurangan yang sering terjadi di korporasi seperti tindak korupsi, penyelewengan dana dan pemalsuan transaksi yang memang seringkali terjadi dalam BUMN. Melihat keadaan ekonomi Indonesia yang terkena krisis dimulai pertengahan tahun 2007 dan terungkapnya kasus-kasus korupsi maka dapat dikatakan bahwa negara kita praktek kecurangan bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Bahkan tahun 2009 banyak perusahaan negara yang tidak transparan bahkan dianggap banyak melakukan korupsi hingga saat ini.

*Institut of Internal Auditors* (IIA) dalam Sawyers (2006:339) menyebutkan bahwa kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan ini sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi yang dilakukan baik oleh orang dalam maupun luar organisasi tersebut. Namun kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan yang merupakan tindakan yang merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan kecurangan memiliki efek terhadap risiko kerugian keuangan karena perusahaan yang terlibat dalam kecurangan sering mengalami kebangkrutan, delisting dari bursa efek, atau melakukan penjualan asset yang material dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat kecurangan, sehingga

perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan tersebut.

Menurut Tunggal (2010:231), pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara : (1) membangun struktur pengendalian intern yang baik (2) mengefektifkan aktifitas pengendalian (3) meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (4) mengefektifkan fungsi internal audit (5) menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas (6) mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti (7) *memberikan* sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi (8) membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun nonkeuangan (9) menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan kepada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi (10) menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja (11) menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Pengendalian intern merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan

perusahaan. Menurut Mulyadi (2002:180), tujuan pengendalian intern adalah untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut: (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional (3) ketaatan pada hukum dan peraturan. Walaupun terdapat perbedaan pengendalian intern yang diterapkan pada masing- masing perusahaan, tetapi unsur- unsur yang mendasarinya harus sama. Pengendalian intern dalam penelitian ini difokuskan kepada kas, karena kas merupakan unsur aktiva lancar perusahaan yang paling likuid, dan hampir semua transaksi keuangan yang terjadi pada akhirnya akan berhubungan dengan kas. Sifat kas itu sendiri mudah untuk dipindah tangankan dan mudah untuk diselewengkan atau digelapkan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengendalian terhadap kas di mana pengendalian terhadap kas akan memisahkan fungsi-fungsi dalam organisasi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi penyimpanan, fungsi operasional, dan fungsi pencatatan (akuntansi). Dengan adanya pemisahan fungsi-fungsi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masing-masing fungsi organisasi yang bersangkutan.

Dengan adanya pengendalian intern seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain, hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Manajemen merancang struktur pengendalian intern yang memadai agar dapat mencapai tujuan.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan, diantaranya yaitu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Eddi (2004) *good*

*corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Menurut Sutoyo (2005:12), Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* di perusahaan- perusahaan publik secara sehat telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan.

Penerapan *good corporate governance* juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Menurut *Forum For Good Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2006, prinsip yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* yaitu *fairness, disclosure and transparency, accountability, responsibility, dan independency*. Prinsip itu penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan *good corporate governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan.

Di Indonesia kasus kecurangan sangat marak terjadi di beberapa daerah termasuk Kota Padang dan tidak tertutup kemungkinan kecurangan itu terjadi pada perusahaan-perusahaan publik seperti BUMN. BUMN merupakan sistem dan organisasi yang kompleks karena keberadaannya sebagai organisasi bisnis yang berhadapan langsung dengan organisasi birokrasi dan politik kekuasaan. Sebagai

organisasi bisnis, BUMN harus berhadapan dengan pasar dan persaingan yang ketat. Jika gagal dalam menghadapi persaingan ini maka kesinambungan usahanya terancam dan bangkrut (Didik, 2006). Jadi karena kuatnya persaingan dalam dunia bisnis maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya kecurangan pada BUMN.

Salah satu kasus yang terjadi diantaranya adalah kasus Pertamina Cabang Padang (2005) yang telah merugikan negara sebesar Rp. 1 Milyar, penyimpangan ini terjadi dalam pengelolaan di depot logistik pertamina di Teluk Bayur, terbukti dengan ditemukannya ketidaksesuaian antara stok yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya di gudang ([www.metronews.com](http://www.metronews.com)). Selain itu juga terdapat kasus *mark-up* (penggelembungan dana) pembelian tanah pembangunan kantor PLN Kuranji sekitar Rp 300 juta yang dilakukan oleh pegawai PLN yang waktu itu selaku ketua panitia pengadaan tanah, dalam pemeriksaan kasus tersebut ternyata ada perbedaan tanah yang dibeli dengan harga yang seharusnya. ([www.padang-today.com](http://www.padang-today.com)).

Berdasarkan fakta di atas, dapat dilihat masih banyaknya kasus kecurangan berupa tindakan korupsi yang terjadi pada BUMN, padahal BUMN didirikan dengan mengemban misi memberikan kontribusi pendapatan kepada negara dan juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kasus kecurangan yang terjadi di Pertamina tersebut disebabkan oleh lemahnya *Good Corporate Governance* sehingga tidak adanya pengungkapan dan transparansi dalam pelaporan stok dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga halnya dalam kasus yang terjadi pada PLN Kuranji, yang menunjukkan masih lemahnya *Good Corporate Governance* dan adanya

indikasi lemahnya pengendalian intern, sehingga terjadinya tindak kecurangan berupa penggelembungan dana (*mark up*) pembelian tanah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Besari (2009) tentang pengaruh kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, ukuran (*size*) dan kompleksitas Bank terhadap *fraud* (kasus pada Bank umum tahun 2007), hasilnya menunjukkan bahwa variabel kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* terbukti berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sumiati (2010), tentang pengaruh ketaatan akuntansi, sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di Kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Peneliti ingin melakukan penelitian kembali. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil pengaruh Penerapan sistem pengendalian intern kas, penelitian ini difokuskan kepada kas karena kas merupakan aktiva yang liquid yang mudah untuk diselewengkan dan implementasi *Good Corporate Governance* sebagai variabel bebas dan kecurangan sebagai variabel terikat sedang objek penelitiannya yang akan dilakukan pada BUMN di Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan (*fraud*) pada BUMN Kota Padang.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Seberapa besar pengendalian intern berpengaruh terhadap kecurangan pada organisasi?
2. Seberapa besar implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap kecurangan pada organisasi?
3. Seberapa besar seleksi pegawai secara ketat berperan terhadap kecurangan pada organisasi?
4. Seberapa besar internal audit (auditor intern) berperan terhadap kecurangan pada organisasi?
5. Seberapa besar imbalan yang memadai berperan pencegahan kecurangan pada organisasi?
6. Seberapa besar *rotation of duties* berperan terhadap kecurangan pada organisasi?
7. Seberapa besar pembinaan rohani berperan terhadap kecurangan pada organisasi?
8. Seberapa besar sanksi yang tegas berperan terhadap kecurangan pada organisasi?
9. Seberapa besar iklim keterbukaan berperan terhadap kecurangan pada organisasi?
10. Seberapa besar kebijakan tertulis mengenai *fair dealing* berperan terhadap kecurangan pada organisasi?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang diungkapkan, maka peneliti akan membatasi masalah hanya pada pengaruh pengendalian intern kas dan implementasi *Good Corporate Governance* terhadap kecurangan (*fraud*).

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar penerapan pengendalian intern kas dan *good corporate governance* berpengaruh secara bersama- sama terhadap kecurangan?
2. Seberapa besar pengendalian intern kas berpengaruh terhadap kecurangan di BUMN kota Padang?
3. Seberapa besar implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap kecurangan di BUMN kota Padang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh pengendalian intern kas, dan *good corporate governance* berpengaruh secara bersama- sama terhadap kecurangan di BUMN kota Padang.
2. Pengaruh pengendalian intern kas berpengaruh terhadap kecurangan di BUMN kota Padang.

3. Pengaruh implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap kecurangan di BUMN kota Padang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pembaca dan peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* terhadap kecurangan.
2. Bagi perusahaan, dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* yang berguna untuk mencegah kecurangan.
3. Bagi akademis, menambah sebuah bukti empiris dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* terhadap kecurangan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kecurangan

###### a. Pengertian

Dalam Sawyer (2006: 339) banyak istilah dalam praktik illegal dan penipuan, diantaranya kecurangan (*fraud*), kejahatan kerah putih, dan penggelapan.

- 1) Kecurangan menurut *Institut of Internal Auditors* (IIA) adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu.
- 2) Kejahatan kerah putih adalah serangkaian tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara nonfisik melalui penyembunyian ataupun penipuan untuk mendapatkan uang ataupun harta benda, untuk menghindari pembayaran atau hilangnya uang atau harta benda, atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau pribadi.
- 3) Penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada dibawah pengawasan pelaku kejahatan.

Definisi *fraud* menurut Black Law Dictionary dalam Tunggal (2010: 218) adalah:

- 1) Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain

untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

- 2) Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

#### **b. Pelaku Kecurangan**

Menurut Tunggal (2010:229), pelaku kecurangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan karyawan/pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aset.

#### **c. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecurangan dan Gejalanya**

Menurut Sawyer (2006:357) terdapat tiga kondisi terjadinya kecurangan atau penggelapan. Tiga faktor ini bersifat kolektif dan dapat terjadi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Situasi akan kebutuhan

Situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut.

2) Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan

Biasanya merupakan situasi dimana tidak terdapat kontrol, atau dimana kontrolnya lemah, atau dimana terdapat kontrol tapi tidak berfungsi.

3) Karakteristik perilaku seseorang

Kedua kondisi di atas dapat terjadi, namun jika individu tersebut memiliki sifat jujur yang tinggi, kecurangan tidak akan dilakukan. Akan tetapi kedua hal di atas dapat menguasai moral dasar seseorang yang menjauhi hal-hal dasar seperti itu dan akan membuka pintu terjadinya penyelewengan.

Menurut Amrizal (2004) dalam Tunggal (2010:233), pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- 2) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- 4) Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

- 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- 6) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

Menurut Tunggal (2010:226), terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

- 1) Keserakahan (*Greed*)
- 2) Kesempatan (*Opportunity*)
- 3) Kebutuhan (*Need*)
- 4) Pengungkapan (*Exposure*)

Menurut Arens (2008:431), kondisi-kondisi penyebab kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan yaitu:

- 1) Insentif/tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan
- 2) Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan
- 3) Sikap/rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.

Gejala adanya *fraud* menurut Tunggal (2010:228) adalah:

- 1) Gejala kecurangan pada manajemen
  - a) Ketidakcocokan diantara manajemen puncak
  - b) Moral dan motivasi karyawan rendah
  - c) Departemen akuntansi kekurangan staf
  - d) Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas
  - e) Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
  - f) Laba menurun sementara utang dan piutang meningkat
  - g) Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama
  - h) Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku
- 2) Gejala kecurangan pada karyawan
  - a) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/penjelasan pendukung
  - b) Pengeluaran tanpa dokumen pendukung
  - c) Pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal/besar
  - d) Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
  - e) Faktur ganda

#### **d. Jenis-Jenis Kecurangan**

*Association of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000)* dalam Tunggal (2010:239), mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

## 1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori menurut Singleton dalam Murniati (2009) :

- a) *Timing difference (improper Treatment of sales)*; bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda atau lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya, misalnya mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya.
- b) *Fictitious revenues*; adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
- c) *Canceled liabilities and expenses*; adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
- d) *Improper disclosures*; adalah bentuk kecurangan laporan keuangan, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan, sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan.
- e) *Improper asset valuation*; adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

## 2) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan dalam :

- a) Kecurangan kas (*cash fraud*); yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
- b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*); adalah kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.

### 3) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi atas :

- a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*); pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam tiga kategori yaitu, rencana penjualan, rencana pembelian dan rencana lainnya.
- b) Suap (*bribery*); adalah penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- c) Pemberian ilegal (*illegal gratuity*); pemberian ilegal hampir sama dengan suap tetapi pemberian ilegal disini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi atau kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.

- d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*); pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap. Penjual menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

**e. Pendeteksian Kecurangan dan Pencegahan Kecurangan**

Menurut BMI *Training & Consulting* teknik mendeteksi *fraud*:

- 1) Perhatikan kelemahan sistem pengendalian intern yang berlaku bagi perusahaan/instansi
- 2) Tentukan titik kelemahan yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi
- 3) Perhatikan informasi awal yang ada, yang berasal dari:
  - a) Hasil audit sebelumnya (*audit ekstern/intern*)
  - b) Informasi masyarakat
  - c) Media massa
  - d) Masukan dari stakeholder, dll

Menurut Tunggal (2010:231), kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :

- 1) Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan.

- 2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian
  - a) Review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.

b) Pengolahan informasi

Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c) Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan

perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d) Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

3) Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4) Mengefektifkan fungsi internal audit

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun dia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.

5) Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas

6) Mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti

- 7) Memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
- 8) Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesuliatan baik dalam hal keuangan maupun nonkeuangan
- 9) Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan kepada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi.
- 10) Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja
- 11) Menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

Menurut Agoes (2000) dalam Murniati (2009), kecurangan dapat dicegah dengan cara :

- 1) Membangun struktur pengendalian intern yang baik.
- 2) Memilih karyawan yang jujur dengan melakukan seleksi pegawai secara ketat.
- 3) Meningkatkan keandalan departemen audit internal.
- 4) Memberikan imbalan yang memadai untuk seluruh pegawai.
- 5) Melakukan *rotation of duties* dan pegawai wajib menggunakan hak cutinya.
- 6) Melakukan pembinaan rohani.
- 7) Memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
- 8) Menumbuhkan iklim keterbukaan dalam perusahaan.

9) Membuat kebijaksanaan tertulis mengenai *fair dealing*.

## **2. Pengendalian Intern**

### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Sistem yang terdapat pada aktivitas yang ada dalam perusahaan perlu dilaksanakan dan diawasi dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem informasi akuntansi membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Akuntan dapat membantu mencapai tujuan ini dengan merancang system pengendalian yang efektif dan dengan cara pengkajian sistem pengendalian yang sekarang dipakai untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif.

Pengendalian intern merupakan istilah telah umum dan banyak dipergunakan dalam berbagai kepentingan. Fungsi pengendalian intern semakin penting karena perusahaan semakin berkembang dengan sistem akuntansi yang semakin rumit. Semua pimpinan perusahaan harus menyadari dan memahami arti penting pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern menurut Widjajanto (2001:18) adalah:

- “suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk:
- a. Mengamankan aktiva perusahaan
  - b. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi
  - c. Meningkatkan efisiensi, dan
  - d. Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap organisasi”.

Menurut IIA dalam Sawyer (2005:59), pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengendalian intern bersifat *preventif* (untuk mencegah

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), *detektif* (untuk mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi, atau *direktif* (untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan).

Dari pengertian diatas dapat diuraikan bahwa manajemen bertanggungjawab menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditor dan para pemakai lainnya baik secara hukum maupun profesionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan benar, jujur dan dipercaya. Pengendalian dalam suatu organisasi bertujuan untuk mendorong penggunaan sumber dayanya termasuk pegawai secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan organisasi. Pengendalian dimaksudkan untuk mengawasi manajemen agar setiap kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan undang- undang yang berlaku, meskipun undang- undang tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan.

#### **b. Tujuan Pengendalian Intern**

Tiga tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2002:180) adalah:

1) Keandalan informasi keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk investor, kreditor, dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggung jawab baik hukum dan professional untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disiapkan secara wajar dengan prinsip yang berlaku umum

2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Kendali dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personil, untuk

mengoptimalkan sasaran manajemen. Bagian penting dari kendali ini adalah informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan intern. Berbagai informasi digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Bagian penting lainnya dari efektivitas dan efisiensi adalah melindungi aktiva dan arsip perusahaan. Aktiva fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, atau hancur secara tidak sengaja kecuali jika dilindungi oleh kendali yang cukup. Hal yang sama berlaku untuk aktiva non fisik seperti piutang dagang, dokumen penting (kontrak pemerintah yang rahasia), dan catatan (buku besar umum dan jurnal).

### 3) Efektivitas dan efisiensi operasi.

Setiap kegiatan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, meskipun hukum dan peraturan tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan perusahaan.

Komponen pengendalian intern menurut Arens (2008:375) terdiri dari:

#### **1) Lingkungan pengendalian**

Komponen penting dari lingkungan pengendalian terdiri atas:

- (a) Integritas dan nilai-nilai etis
- (b) Komitmen untuk kompetensi
- (c) Partisipasi dewan direksi atau komite audit
- (d) Filosofi dan gaya operasional manajemen
- (e) Struktur organisasi
- (f) Penugasan dari otoritas dan tanggung jawab
- (g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

## **2) Penilaian risiko**

Penilaian risiko adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Perusahaan menetapkan penilaian risiko terkait produk, penetapan metode pengukuran risiko, penentuan batas dan toleransi risiko, menetapkan pengendalian intern, dan mengidentifikasi dan menganalisis risiko.

## **3) Aktivitas pengendalian**

Ada lima jenis aktivitas pengendalian yaitu:

- (a) Pemisahan kewajiban yang memadai
- (b) Otorisasi yang sesuai dari transaksi dan aktivitas
- (c) Dokumen dan catatan yang memadai
- (d) Pengendalian fisik atas asset dan catatan
- (e) Pemeriksaan independen atas penampilan

## **4) Informasi dan komunikasi**

Tujuan informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas untuk asset yang terkait. Informasi diidentifikasi dan dikomunikasi dengan tepat, cukup dan tepat waktu agar informasi tersebut dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Agar informasi tersebut tepat dan tepat waktu perusahaan harus memiliki sistem informasi yang berfungsi dengan baik. Informasi yang ada juga dilaporkan dalam laporan keuangan.

## **5) Pengawasan**

Pengawasan terkait dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi- kondisi tertentu.

### **3. Prosedur Pengendalian Kas**

#### **a. Pengertian Kas**

Kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian intern yang baik atas kas dan bank. Sistem pengendalian kas adalah prosedur yang dianut untuk menjaga dana kas perusahaan. Sistem ini membentuk pengendalian intern yang memadai terhadap kas.

Pengendalian intern kas merupakan salah satu cara untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak diselewengkan. Meskipun penyelewengan itu tidak mungkin untuk dihilangkan tetapi dengan pengendalian intern kas penyelewengan ini dapat dihindari.

#### **b. Pengendalian Intern Kas**

Menurut Mulyadi (2001:165) elemen- elemen pengendalian dalam siklus kas adalah :

Pengendalian intern merupakan proses yang terdiri dari usaha atau tindakan- tindakan- tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus dilakukan untuk mencapai

tujuan perusahaan. Agar dapat berjalan dengan baik, dalam merancang suatu pengendalian intern perlu diperhatikan unsur- unsur pokok yang membangun pengendalian intern tersebut.

Menurut Mulyadi (2001:164), unsur- unsur pokok dalam sistem pengendalian intern kas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit- unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional organisasi ini berdasarkan pada prinsip- prinsip sebagai berikut:

1) Harus dipisahkan fungsi- fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi para pejabat yang mewakili wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- Cara- cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
- 1) Penggunaan formulir urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.
  - 2) Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
  - 3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain, sehingga terjadi *internal check* terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait.
  - 4) Perputaran jabatan( *job rotation*). Pertukaran jabatan yang dilaksanakan secara rutin akan dapat menjaga indepenesi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga persengkokolan diantara mereka dapat dihindari.
  - 5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen

yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.

- 6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi lain dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.
- 7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek afektivitas unsur- unsur sistem pengendalian intern yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawasan intern atau staf pemeriksa intern. Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektivitas unsur- unsur system pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

**d.** Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendapat karyawan kompeten dan dapat dipercaya, cara berikut dapat ditempuh:

- 1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
- 2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaan.

Bagaimanapun baiknya suatu struktur organisasi, semuanya tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Elemen- elemen di atas sama pentingnya karena merupakan dasar setiap pengendalian intern, sebab apabila salah satunya terdapat suatu kelemahan maka dapat menghambat jalannya seluruh system pengendalian intern.

**e. Hubungan pengendalian intern kas dengan kecurangan (*fraud*)**

Dalam Sawyer (2005:59) pengendalian intern merupakan setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengendalian intern dapat bersifat *preventif* untuk pencegahan hal- hal yang tidak diinginkan melalui elemen- elemen pengendalian intern secara efektif. Kas merupakan unsur aktiva lancar perusahaan yang paling likuid, dan hampir semua transaksi keuangan yang terjadi pada akhirnya berhubungan dengan kas. Sifat kas itu sendiri mudah untuk di pindah tangankan dan mudah diselewengkan atau digelapan. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan pengendalian terhadap kas dimana pengendalian terhadap kas akan memisahkan fungsi- fungsi dalam organisasi. Fungsi- fungsi tersebut antara lain fungsi penyimpanan, fungsi operasional, dan fungsi pencatatan (akuntansi). Dengan adanya pemisahan fungsi- fungsi tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masing- masing fungsi organisasi yang bersangkutan.

Dengan adanya pengendalian intern seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain, hal ini dapat mencegah

terjadinya kecurangan dan mengalokasikan kesalahan. Manajemen merancang struktur pengendalian intern yang memadai agar dapat mencapai tujuan.

Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan telah diuji dalam sebuah penelitian yang dilakukan Sumiati (2010), tentang pengaruh ketaatan akuntansi, sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di Kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### ***4. Good Corporate Governance***

Praktik GCG dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan- keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, 2003:4).

Negara, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar yang saling berhubungan dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk menerapkan GCG. Pada saat ketiga pilar tersebut masing- masing melaksanakan perannya dengan baik, maka dapat tercipta pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang- undangan. Dengan pasar seperti itu dunia usaha dapat lebih kondusif dalam berusaha atas dasar prinsip GCG transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kewajaran dan kesetaraan ([www.governance-indonesia.com](http://www.governance-indonesia.com)).

### a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), 2003 adalah:

*“Good Governance is collection of board principles and practices for the efficient, effective, and profitable running of an organization in pursuit of strategic objectives and in compliance with principles of best business practice and applicable legal and regulatory requirements.”*

FCGI memandang bahwa tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip dan praktik dewan pengurus untuk efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas perusahaan dalam mencapai sasaran objektif dan keselarasannya dengan prinsip praktik bisnis terbaik dapat digunakan secara legal dan keperluan pengaturan.

Keputusan menteri Negara BUMN nomor: PER — 01/MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefinisikan GCG sebagai:

*“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”*

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. GCG dapat dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan

(*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan- kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

#### **b. Tujuan *Good Corporate Governance***

Lima tujuan utama *Good Corporate Governance* menurut Sutojo, (2008:5) adalah:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Tujuan *Good Corporate Governance* menurut Surya, (2006:68) adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan

#### **c. Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip *Corporate Governance* menurut *Ocean for Economic Corporation and Development* (OECD), 2004:

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan *Good Corporate Governance secara efektif*.

Apabila pemerintah suatu negara menginginkan prinsip-prinsip GCG diterapkan secara efektif di negaranya wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Landasan hukum tersebut berupa penciptaan undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang perburuhan, undang-undang tentang kredit perbankan, ketentuan tentang SAK dan standar audit dan syarat serta prosedur pendaftaran saham perusahaan di bursa efek.

2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan

Hak-hak tersebut dilindungi, baik secara hukum maupun oleh masing-masing perusahaan.

3. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham

Perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

4. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*

Adanya perlindungan hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham. Hal itu disebabkan karena keberhasilan operasi bisnis perusahaan ditentukan oleh hasil kerjasama para anggota *stakeholders*, termasuk para pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan dan para pemasok layanan jasa, bahan baku dan bahan pembantu.

5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan

Perusahaan wajib melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat waktu, hal- hal yang bersangkutan dengan kondisi keuangan kepemilikan, kinerja bisnis, dan hal- hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

6. Tanggung jawab dewan pengurus

*Board of Directors* bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan yang mereka kelola terhadap undang- undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang- undang tentang perpajakan, perburuhan, lingkungan hidup dan keselamatan kerja.

Prinsip- prinsip GCG menurut Forum for *Good Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), 2001:

1. *Fairness*(kewajaran)

- a. Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*Corporate conduct*) dan atau kebijakan- kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan.
- c. Menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi.
- d. Menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun.
- e. Mengedepankan *equal job opportunity*.

2. *Disclosure and transparency* (Transparan)

- a. Mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasis standar akuntansi dan *best practice* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
  - b. Mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi.
  - c. Mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas.
  - d. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
- a. Menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat.
  - b. Mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris.
  - c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practice* (bukan sekedar audit).
  - d. Menjaga manajemen kontrak yang bertanggungjawab dan menangani pertentangan (*dispute*).
  - e. Penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi)

f. Menggunakan external auditor yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

#### 4. Responsibility (Responsibilitas)

a. Kesadaran bahwa bertanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.

b. Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.

c. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

d. Menjadi profesionalis yang menjunjung etika.

e. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

#### **d. Hubungan Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)**

Penerapan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk overstated dan ketidakwajaran yang merugikan para *stakeholders*. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan- kesalahan signifikan dalam korporasi dan memastikan kesalahan- kesalahan yang terjadi dengan segera (Tjager, 2003:29).

Praktik GCG dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, 2004). GCG juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang

optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan ( Sutojo, 2008).

Pengaruh implementasi *good corporate governance* terhadap kecurangan telah diuji dalam sebuah penelitian yang dilakukan dilakukan Besari (2009) tentang pengaruh kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, ukuran (*size*) dan kompleksitas Bank terhadap *fraud* ( kasus pada Bank umum tahun 2007), hasilnya menunjukkan bahwa variabel kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* terbukti berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

## **B. Penelitian Relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh Besari (2009) tentang pengaruh kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, ukuran (*size*) dan kompleksitas Bank terhadap *fraud* ( kasus pada Bank umum tahun 2007), hasilnya menunjukkan bahwa variabel kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* terbukti berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Kemudian penelitian oleh Monigka (2007), tentang pengaruh pengendalian intern dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan ritel di Kota Manado, Tomoha dan Bitung, hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sumiati (2010), tentang pengaruh ketaatan akuntansi, sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di Kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengambil pengaruh Pengendalian Internal Kas dan Implementasi *Good Corporate Governance* sebagai variabel bebas dan kecurangan sebagai variabel terikat, yang akan dilakukan pada BUMN di Kota Padang.

### **C. Kerangka Konseptual**

Pengendalian Intern meliputi lima elemen pengendalian intern yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen telah terpenuhi dalam kategori sebagai berikut: (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi dari operasional dan (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan. Unsur-unsur pengendalian intern kas tersebut adalah (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dan (4) karyawan yang sesuai mutunya. Pengendalian efektif apabila keempat unsur pengendalian intern tersebut ada dan berfungsi secara efektif. Jika pengendalian intern telah efektif maka hal-hal yang akan menimbulkan terjadinya kecurangan akan dapat dicegah. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian intern yang baik atas kas dan bank.

Implementasi prinsip-prinsip *GoodCorporate Governance* (GCG) ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan. GCG, mengarahkan, melakukan perencanaan dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan yang sehat, sehingga kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dirasakan sangat kuat dalam BUMN.

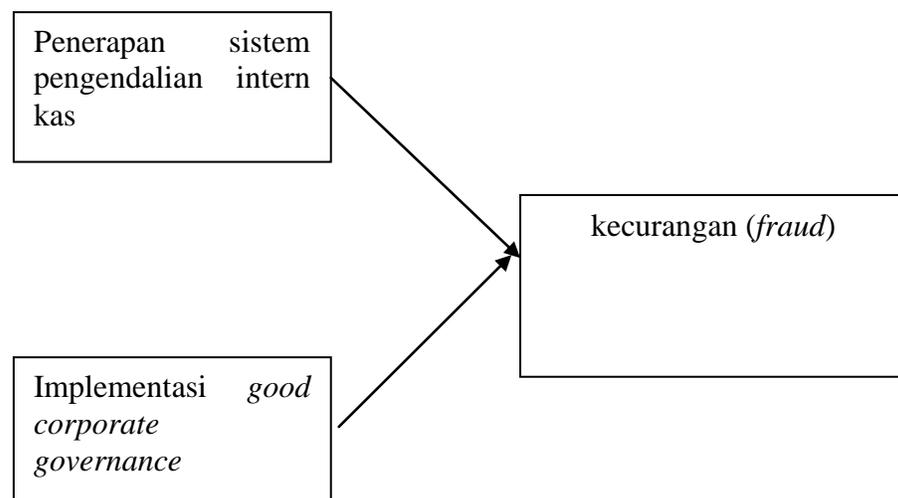
Prinsip *fairness* menyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip tertua dalam bidang hukum perusahaan. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan. Prinsip *disclosure and transparency* mensyaratkan adanya jaminan mengenai pengungkapan yang tepat waktu dan akurat terhadap semua hal serta faktor-faktor risiko bersifat material dapat diperkirakan.

Prinsip akuntabilitas yang didasarkan pada sistem *checks and balances* mencakup praktik audit yang sehat akan menghindari konflik antara direksi dan pemegang saham sehingga kerugian-kerugian yang timbul di perusahaan dapat dicegah. Rusaknya nama baik perusahaan akan menimbulkan kerugian yang sama besarnya dengan kerugian produksi atau penjualan. Untuk mencegah semua kemungkinan buruk tersebut, implementasi prinsip tanggung jawab harus secepatnya dijalankan.

Prinsip independensi menyatakan pengelolaan sebuah perusahaan secara professional. Pelaksanaan prinsip ini ditujukan untuk menghindari kerugian akibat adanya dominasi yang tidak wajar dalam perusahaan dan untuk menghindari segala bentuk kepentingan dari berbagai pihak yang terjadi dalam perusahaan menandakan lemahnya prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas di perusahaan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan penurunan reputasi bisnis.

#### Pengungkapan informasi perusa-

haan secara transparan menjadi salah satu sarana untuk menerapkan sistem pengendalian intern perusahaan. Dengan sistem pengendalian intern yang efektif perusahaan dapat terhindar dari malapetaka kerugian yang besar karena hal-hal yang sebelumnya tidak pernah disangka bakal terjadi. Tanpa sistem pengendalian yang efektif, kendala atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian besar dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi oleh pemilik perusahaan.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dalam kajian teori yang telah disebutkan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Penerapan pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* secara bersama- sama berpengaruh terhadap kecurangan.

H<sub>2</sub>: Penerapan sistem pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.

H<sub>3</sub>: Implementasi *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh penerapan sistem pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* pada perusahaan BUMN di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di Kota Padang.
2. Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di Kota Padang.
3. Pengaruh implementasi *good corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di Kota Padang.

#### **B. Keterbatasan dan Saran Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya kuesioner yang dapat diolah karena banyaknya perusahaan yang menolak untuk mengembalikan kuesioner dengan alasan sedang sibuk atau tidak menerima penelitian sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua kantor perusahaan BUMN di Kota Padang.
2. Responden mengisi kuisisioner dipengaruhi oleh psikologi responden itu sendiri sehingga dalam pengisian kuesioner mereka menjadi tidak teliti.

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar memperluas cakupan penelitian, misalnya kota lain di luar Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat sehingga bisa terlihat secara menyeluruh.
2. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, dengan melihat *Adjusted R Square* penelitian ini yang masih hanya 30,8% dipengaruhi oleh variabel Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern kas dan implementasi *good corporate governance* terhadap kecurangan maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas sampel dan menambahkan variabel lain seperti internal audit, kompensasi, iklim keterbukaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2000. *Auditing, Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Amin, widjaja Tunggal. *Praktek Kecurangan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arens A. Alvin, Ellder J. Ronald & Beasley Mark s. 2008. *Auditing dan jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Besari. *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, ukuran (size) dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud*. Tesis. UNDIP
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Empat
- Koncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Rise tuntuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Yogyakarta :Salemba Empat
- Mulyadi. 2001. *Sitem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Murniati. 2009. *Pengaruh Pengendalian Intern dan Audit Internal terhadap pencegahan kecurangan*. Skripsi: Universitas Negeri Padang.
- Sawyer, B Lawrence, Mortimer A. Dittenhofer & James H. Scheiner. 2005. *Sawyer,s Internal Audit, Audit Internal Sawyer*. Buku 1. Jakarta: Salemba.
- Singleton, Tommie, et. al. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Canada: JonhWley and Sons, Inc.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sumiati, 2010. *Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Akuntansi*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Surya, Indra & Yustiavanda, Ivan. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak- hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: PT Damar Mulia Mustika
- Sutojo, Siswanto dan E. jhon Aldrige. 2005. *good corporate governance Tata kelola perusahaan yang sehat*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka

Tjager, I.Nyoman. Et.al. 2003.*Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*.Jakarta: PT Prenhallindo.

Yogi, Vesri. 2008. “*Analisis efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran dan Penerimaan Kas*”. skripsi: Universitas Negeri Padang.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta